

# KONSTRUKSI

Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 6 Tahun 2017



**KONSTRUKSI INDONESIA 2017:  
ERA BARU INDUSTRI KONSTRUKSI  
DI INDONESIA**

**RANGKAIAN KONSTRUKSI INDONESIA 2017:  
BILATERAL MEETING UNTUK  
DUKUNG ERA BARU INDUSTRI  
KONSTRUKSI INDONESIA**

**DITJEN BINA KONSTRUKSI MENOREHKAN PRESTASI  
PADA RANGKAIAN HARI BHAKTI  
KEMENTERIAN PUPR**

**PANGLIMA KONSTRUKSI DUKUNG**

**SERTIFIKASI  
TENAGA KERJA  
KONSTRUKSI**

### 3 | BERITA UTAMA

'Panglima Infrastruktur'

Dukung Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi



### BERITA UTAMA

- 6| Konstruksi Indonesia 2017 : Era baru Industri Konstruksi di Indonesia
- 10| *Workshop* Rantai Pasok Penerapan Teknologi Sumber Daya Konstruksi : Kesiapan Sumber Daya Konstruksi Untuk Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

### BERITA TERKINI

- 14| Rangkaian Konstruksi Indonesia 2017 : Bilateral Meeting untuk Dukung Era Baru Industri Konstruksi Indonesia
- 16| *Indonesia Economy And Infrastructure Outlook* 2018
- 18| TKDN : Kebijakan Strategis Untuk Meningkatkan Peran Nasional dalam Industri Konstruksi

### LIPUTAN KHUSUS

- 21| Mencetak Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten Melalui Program Sinergi Pendidikan SMK dengan Dunia Industri (*Link and Match*)
- 23| Ditjen Bina Konstruksi Menorehkan Prestasi pada Rangkaian Hari Bhakti Kementerian PUPR
- 26| Selayang Pandang Tentang Sistem Manajemen K3 di Aspal Buton Sulawesi Tenggara
- 28| Kaleidoskop Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2017

### BERITA HIBURAN

- 30| Visi Menjadi Mimpi, Mimpi Menjadi Visi



Tidak terasa penghujung tahun 2017 sudah di depan mata. Hari demi hari sepanjang tahun ini sungguh menyenangkan untuk tim redaksi karena bisa menyajikan informasi – informasi terkini seputar dunia konstruksi khususnya kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

Diakhir edisi terakhir tahun 2017 ini tim redaksi merefresh kembali ingatan para pembaca setia Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi dengan menghadirkan kaleidoskop capaian Ditjen Bina Konstruksi sepanjang tahun 2017. Tidak hanya itu, pada edisi 6 ini Kami menyajikan berita utama seputar sertifikasi massal kurang lebih 10.000 ribu tenaga kerja konstruksi yang dihadiri dan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Para tenaga kerja konstruksi patut berbangga hati, pasalnya di masa pembangunan infrastruktur yang besar-besaran seperti saat ini orang nomor satu di Indonesia tersebut menyempatkan hadir dan mengobarkan semangat para pahlawan infrastruktur. Selain itu, ajang tahunan Konstruksi Indonesia 2017 kembali digelar. Mengusung tema “Era Baru Industri Konstruksi Indonesia”, ajang yang tergabung dalam *Indonesia Infrastructure Week* (IIW) 2017 berhasil menggaet 300 *stakeholder* dalam dan luar negeri untuk memamerkan teknologi terbaru bidang konstruksi saat ini.

Acara yang digelar pada 9 – 11 November 2017 di Jakarta Convention Center ini juga dimeriahkan dengan Pameran berbagai alat berat, teknologi, hingga inovasi terbaru dunia konstruksi, *workshop* tentang Rantai Pasok Sumber Daya Jasa Konstruksi, dan berbagai pertemuan bilateral selama penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2017.

Di edisi ini juga kami sampaikan selayang pandang tim redaksi yang sempat menghadiri kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan meninjau sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan berkelanjutan di daerah Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi juga bisa menjadi pilihan tambahan bagi pembaca dalam edisi ini.

Pembaca setia Buletin Ditjen Bina Konstruksi juga bisa membaca tentang inovasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan upaya sekuritisasi pendapatan jalan tol Jagorawi yang dikelola oleh PT. Jasa Marga yang belakangan menjadi perbincangan hangat karena menerapkan sistem bayar tol dengan uang elektronik atau *e-money*. Sejauh ini inovasi terbaru tersebut cukup efektif mengurangi kemacetan yang sering terjadi di jalan tol Jagorawi dan sekitarnya.

Tidak lupa, tim redaksi juga menghadirkan Kemeriahan Hari Bakti Kementerian PUPR yang ke 72. Dalam rangka Hari Bakti PU diselenggarakan berbagai kegiatan menarik untuk memperkuat kerja sama para pegawai dan staf Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mengikuti lomba-lomba seperti paduan suara, bulutangkis, tenis meja, tenis, futsal, senam poco-poco dan sepeda santai Jakarta - Bandung. Dimana DJBK menorehkan prestasi.

Di usia 72 tahun Kementerian PUPR terus bersemangat membangun infrastuktur bidang Ke-PUPR-an di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Marauke. Hal serupa yang Ditjen Bina Konstruksi rasakan untuk selalu menciptakan pembinaan jasa konstruksi yang handal, kokoh, dan terpercaya. Semoga semangat ini akan terus terpelihara hingga ke tahun 2018 yang akan segera hadir membawa harapan baru. Semangat Membaca !

Redaksi

**Pembina/Pelindung:** Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi; Direktur Bina Investasi Infrastruktur; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan. **Pemimpin Umum:** Hambali. **Pemimpin Redaksi:** Kristinawati Pratiwi Hadi. **Penyunting / Editor:** Indri Eka Lestari, Mirza Ayu Anindita, Hari Mahardika. **Redaksi Sekretariat:** Thyoria Mariska Girsang, Agus Raharyo, Emy Zubir, Vita Puspitasari, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** M. Aldenny, Tri Berkah, Agus Firngadi. **Desain dan Tata Letak:** Dagu Komunika. **Fotografer:** Sri Bagus Herutomo.

**KONSTRUKSI**

Alamat Redaksi:

Gedung Utama Lt. 10

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tlp/Fax : 021-72797847,

E-Mail : hukumdatakompu.djbjk@gmail.com



## 'PANGLIMA INFRASTRUKTUR' DUKUNG SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka kegiatan sertifikasi massal yang dilakukan kepada hampir 10.000 tenaga kerja konstruksi Indonesia pada (19/10) lalu di Gelora Bung Karno Jakarta. Tidak hanya hadir membuat riuh para tenaga kerja konstruksi Indonesia, ia pun membaur bersama 'wong cilik'.

Hampir setengah jam dihabiskan orang nomor satu di Negara ini hanya untuk berkeliling menyalami dan menyapa tenaga kerja konstruksi atau yang biasa disebut tukang. Bahkan sesekali melayani mereka untuk ber-swafoto. Pemandangan ini meletupkan rasa haru sekaligus bangga, sebab saat itu perhatian hanya tertuju pada para pahlawan infrastruktur yang setiap hari bergelut dengan debu, lumpur untuk membangun pondasi demi pondasi hingga berdirilah produk-produk infrastruktur, yang memang saat ini sedang digadang-gadang oleh pemerintah.

Sertifikasi tersebut di lakukan serempak di beberapa wilayah Indonesia berjumlah 9.679 orang pekerja konstruksi yang terdiri dari tenaga terampil bersertifikat meliputi tukang, mandor, pelaksana, *drafter*, *surveyor*, operator dan pengawas sebanyak 9.024 orang dan 655 orang tenaga ahli bidang K3,

Administrasi Kontrak, Manajemen Proyek, dan Manajemen Konstruksi. Tenaga kerja tersebut termasuk yang sedang bekerja untuk pembangunan Gelora Bung Karno dan Jakabaring dalam rangka mendukung ASIAN GAMES.

Perhatian yang diperlihatkan oleh pemimpin Negara ini seolah membuka mata kita semua. Bagaimana sebenarnya tenaga kerja konstruksi di Indonesia saat ini, di tengah-tengah gencarnya pembangunan infrastruktur.

Sebagaimana diketahui sektor konstruksi menyumbang sekitar 14.3% dari PDB Indonesia, dengan nilai mencapai Rp 446 triliun. Setidaknya dari setiap Rp 1 Triliun pembangunan infrastruktur dibutuhkan



± 14.000 tenaga kerja. Sementara jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi hingga saat ini, baru ± 702.279 orang, dari total jumlah tenaga kerja sebanyak 7,7 juta.

Kemudian apakah perlunya sertifikasi tersebut. Jawabannya terdapat pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017, dimana disebutkan pada pasal 70 ayat (1), yang berbunyi: 'Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja'. Kemudian di ayat (2), kewajiban ini semakin dipertegas dimana bagi pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Apabila ditemukan ada pengguna dan/atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif. Mulai dari denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan.

Amanat UU Jasa Konstruksi No.2/2017 menyatakan bahwa sertifikat dikeluarkan oleh Menteri yang terkait dengan jasa konstruksi. Namun, Menteri memberikan sebagian kewenangannya tersebut kepada lembaga yang bernama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk menerbitkan sertifikat. Sertifikasi dilakukan melalui proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi dan/atau Lembaga Diklat yang telah diakreditasi oleh LPJK dan teregistrasi.

Ketegasan aturan ini bukan tanpa alasan. Sebab tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat mendapatkan manfaat diantaranya jaminan kejelasan besaran imbalan/gaji sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan memberikan perlindungan hukum pada profesi. Dengan demikian tenaga kerja konstruksi akan lebih terlindungi, dan tentunya diakui oleh Negara maupun institusi tempat dimana dia bekerja.

Hal ini juga ditekankan oleh Joko Widodo pada kesempatan yang sama, bahwa pemerintah sangat mendorong sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Bukan hanya untuk menjalankan peraturan tapi untuk kesejahteraan tenaga kerja konstruksi itu sendiri. Melalui sertifikasi akan ada jaminan kejelasan remunerasi bagi tenaga kerja dan mengurangi terjadinya kegagalan bangunan. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan hukum pada profesi di bidang jasa konstruksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itulah, Pemerintah bersamaan



dengan program Percepatan Infrastruktur, melaksanakan berbagai upaya Program percepatan sertifikasi. Salah satunya dengan melaksanakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara serentak. Sebelumnya, acara serupa juga dilaksanakan di tempat yang sama, (21/8) dengan mensertifikasi 3.255 pekerja konstruksi di berbagai wilayah Indonesia.

Tidak hanya itu, upaya lain yang disiapkan dan sedang dilaksanakan Kementerian PUPR antara lain *distance learning*, pelatihan mandiri, *mobile training unit*, *link and match* dengan lembaga pendidikan, dan seterusnya. Metode *distance learning* adalah metode belajar berbasis teknologi informasi, yaitu tenaga kerja yang akan melakukan uji dapat mengakses melalui <https://sibima.pu.go.id>. Sedangkan pelatihan mandiri dan *mobile training unit* ditujukan untuk melatih dan mensertifikasi tenaga terampil.

Pada metode *on site project*, tenaga kerja akan disertifikasi langsung di lokasi kerjanya. Untuk pelatihan mandiri, memanfaatkan tenaga mandor untuk melakukan pengujian kepada tenaga kerjanya. Sebelum melakukan uji, mandor

harus mendapatkan sertifikasi kompetensi dan instruktur mandiri. Sedangkan *mobile training unit* adalah sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan bahan-bahan uji (alat tukang, *plumbing*, elektrikal, kayu) dan dapat dimobilisasi hingga ke pelosok wilayah Indonesia.

Metode lain yang juga dikembangkan adalah bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Melalui program *link and match*, siswa dibekali melalui kurikulum yang sudah berbasis industri. Tujuannya adalah siswa saat lulus, akan mendapatkan dua ijazah, yakni ijazah akademis dan sertifikat kompetensi. Untuk tahun 2017, Kementerian PUPR melakukan uji coba di 13 SMK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan direncanakan pada bulan Februari 2018, akan dilakukan uji kepada ± 1.500 siswa SMK. Diantaranya SMKN 2 Yogyakarta, SMKN 2 Palembang, SMKN 3 Papua dan SMKN 1 Jakarta.

Sedangkan untuk perguruan tinggi, program ini masih sedang dalam pembahasan penyusunan pedoman *link and match* dan penyesuaian kurikulum terkait. Namun setidaknya sudah ada 22 Perguruan Tinggi Swasta di Jabodetabek



terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini pun ditunjukkan dengan perhatian langsung dari pemimpin Negara dan panglima pembangunan infrastruktur, Joko Widodo, bahwa tenaga kerja konstruksi lah yang patut mendapat perhatian kita semua. Jika pemimpin Negara saja memberikan perhatian begitu besar, maka sudah sepatutnyalah kita sebagai pengguna semua produk infrastruktur harus turut peduli. Karena akhirnya akan kembali kepada kita, jika produk infrastruktur berkualitas, maka masyarakat pasti nyaman dan aman. Demikian pula sebaliknya.

Kuncinya adalah bersertifikat. Meskipun demikian, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, para pekerja konstruksi jangan lantas berpuas diri setelah mendapatkan sertifikat.

“Jangan berhenti pada selembarnya sertifikat, saya minta mutunya, kualitasnya, standar-standarnya betul-betul kita jaga bersama dan juga beradaptasi pada perkembangan teknologi” tegas Joko Widodo, menutup acara yang penuh gegap gempita para pahlawan infrastruktur tersebut.\*



yang siap turut serta dalam program ini. Diantaranya Universitas Pancasila, Universitas Trisakti, Universitas Bung Karno, Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Universitas Pembangunan Jaya. Diharapkan, melalui program ini, *backlog* tenaga kerja

tersertifikasi dapat diminimalisir dan tersedia sesuai dengan kebutuhan industri serta siap kerja.

Berbagai upaya Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja konstruksi adalah ‘pondasi’ dari





# KONSTRUKSI INDONESIA 2017 : Era baru Industri Konstruksi di Indonesia

Indonesia Infrastructure week (IIW) 2017 kembali digelar, dengan menggabungkan dua event besar sektor konstruksi seperti Konstruksi Indonesia dan *The Big 5 Construct* Indonesia menjadi gambaran besarnya sektor konstruksi di Indonesia saat ini. Dengan mengusung tema “Era Baru Konstruksi Indonesia”, Konstruksi Indonesia 2017 yang beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017, hadir membawa harapan baru untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui Undang-undang ini, sektor jasa konstruksi digiring ke arah baru yaitu penguatan *stakeholder* Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan.

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan dengan maraknya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur

skala besar harus didukung dengan kesiapan industri konstruksi dan kesiapan rantai pasok konstruksi sumber daya konstruksi. Bahkan tidak berlebihan jika Presiden terjun langsung sebagai “Panglima infrastruktur” untuk meninjau pembangunan yang ada di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui bersama Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa sektor infrastruktur adalah sektor penting, karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan nilai perekonomian tidak hanya di ibu kota atau kota-kota besar, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia bahkan hingga ke wilayah perbatasan di Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Plt. Dirjen Bina Konstruksi Danis Sumadilaga bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roselani dan Menteri

Perencanaan dan Pembangunan Indonesia/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, membuka kegiatan pada Rabu (8/10) di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.

“Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Oleh karena itu, segenap upaya akan kita curahkan terus menerus dalam upaya membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih maju infrastrukturnya.”, jelas Danis.

Industri konstruksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini berkembang pesat dengan berbagai program pembangunan infrastruktur. Rantai pasok perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mendukung hal



tersebut, Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 secara tegas menyebutkan pada pasal 17 ayat (1) : Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. Tujuan dari adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi dalam UU No. 2 Tahun 2017 adalah agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah.

Selain itu beberapa hal penting lainnya yang diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini antara lain: adanya pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan

jasa konstruksi, meningkatkan peran masyarakat sebagai bagian kemitraan dan sistem informasi, perlindungan hukum terhadap upaya menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi, perlindungan bagi tenaga kerja, sebagai jaring pengaman terhadap investasi serta menjamin pola persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Saat ini, peraturan turunan dari Undang-Undang ini sedang dalam masa penyusunan. Untuk diketahui bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi mengamankan penyusunan 1 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden dan Peraturan-Peraturan Menteri PUPR untuk mendukung terimplementasinya

setiap pengaturan dalam Undang-Undang ini.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur yang berhasil dilaksanakan oleh Kementerian PUPR antara lain: 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) dimana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 Ha (11 %) menjadi 859.626 Ha (12,9 %); pembangunan jalan tol APBN dan non-APBN yang telah terbangun sepanjang 568 Km dari target 1000 km pada akhir 2019 nanti; peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum yang telah mencapai 20.430 liter/detik; capaian penyediaan





**"Segenap upaya akan dicurahkan terus menerus dalam upaya membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain"**

perumahan yang telah mencapai 2.204.939 unit; dan seterusnya.

Tidak berhenti sampai disana, untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015 – 2019, Kementerian PUPR terus bekerja tiada henti. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan akan terbangun 1.851 Km jalan tol, tersedianya 70.471 liter/detik air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, dan lain sebagainya. Dengan target yang demikian besar, pasokan sumber daya konstruksi sangatlah dibutuhkan. Tanpa adanya dukungan dari *stakeholders* yang berkecimpung di bidang

penyediaan sumber daya konstruksi mustahil kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Sementara itu, Menteri Bambang dalam sambutannya mengatakan Indonesia pada tahun 2045 atau bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan dapat menjadi negara maju dan masuk ke dalam kategori negara dengan berpendapatan menengah ke atas (*high income*). Namun syaratnya, pertumbuhan ekonomi harus tetap konsisten di lima persen.

Saat ini Indonesia masih masuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah dengan kisaran pendapatan US\$

3.600-3.700 per kapita. Sedangkan untuk bisa dikategorikan sebagai negara maju, pendapatan perkapitanya paling tidak harus sekitar US\$ 20 ribu per kapita. Melihat tersebut maka kita harus konsisten dalam mempertahankan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun.

"Saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi kita menurun, namun bukan berarti kita pasrah begitu saja. Jika kita hanya mengikuti *business as usual*, maka kita akan selalu menghadapi tantangan dalam



menjaga pertumbuhan lima persen tadi. Maka perlu ada terobosan dan upaya lebih. Upaya yang seperti apa, yaitu bagaimana kita terlebih dahulu memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi, membuka pasar, dan menghidupkan manufaktur,” jelas Menteri Bambang.

Jika berbicara mengenai pembiayaan infrastruktur, Menteri Bambang mengatakan saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup menanggung 41 persen, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya 22 persen, masih ada gap kosong sekitar 37 persen. Menteri Bambang berharap, kekosongan ini dapat diisi oleh sektor swasta.

“Kami sudah berusaha memfasilitasi peran swasta, baik dalam PPP (*Public Private Partnership*), KPBU, dan PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah). Dan juga kita mendorong tentunya lebih banyak *private* sektor untuk lebih banyak bertindak sebagai investor, karena disinilah peran investor sangat diperlukan,” ujar Menteri Bambang.

Konstruksi Indonesia 2017 sebagai ajang bertemunya stakeholders konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai wadah yang tepat untuk mencari solusi sekaligus tempat berkoodinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan pasokan sumber daya konstruksi.

Konstruksi Indonesia 2017 dan *The Big 5 Construct Indonesia 2017* dirancang sebagai jembatan bagi beragam elemen di sektor

## “Diharapkan tahun ini baik asing maupun domestik mampu berinvestasi hingga menembus angka \$18 Miliar, sehingga mampu menjadi ajang pengambilan keputusan yang tinggi sehingga pengusaha kecil dan menengah mampu mendapatkan proyek infrastruktur”

konstruksi, mulai dari pihak kontraktor swasta, pemerintah, BUMN, akademisi dan masyarakat luas untuk berbisnis dan berdiskusi sekaligus mendorong perkembangan industri konstruksi yang potensial.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roselani mengatakan bahwa pemerintah saat ini terus menggenjot pendanaan infrastruktur, bukan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berusaha menggaet swasta untuk berinvestasi di Indonesia.

“Diharapkan tahun ini baik asing maupun domestik mampu berinvestasi hingga menembus angka \$18 Miliar, sehingga melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu ajang pengambilan keputusan yang tinggi sehingga pengusaha-pengusaha kecil dan menengah mampu mendapatkan proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah serta seluruh industri yang terkait langsung

maupun tidak langsung mampu mendukung pembangunan infrastruktur.” ujar Rosan

Peserta pameran yang berpartisipasi terdiri dari 315 *stand* yang berasal dari berbagai negara seperti Jerman, Malaysia, Singapura, Iran, Korea, dan sebagainya. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, peserta dalam pameran ini naik hingga 50% lebih, dimana pada tahun 2016 diikuti 200 peserta. Konstruksi Indonesia 2017 dan *The Big 5 Construct Indonesia 2017* dihelat bersamaan dengan Indonesia *Infrastructure Week (IIW) 2017*. Hal ini menjadikan ajang tersebut sebagai salah satu pameran dan konferensi konstruksi/infrastruktur terbesar di tanah air.

Selain pameran dilaksanakan pula berbagai *workshop* menarik, yang salah satunya *Workshop Konstruksi Indonesia 2017* dengan mengambil tema “Rantai Pasok Penerapan Sumber Daya Konstruksi dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, pada 9 November 2017, Jakarta Convention Center.



**D**alam kondisi perekonomian global yang sangat dinamis saat ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan optimisme agar situasi ekonomi nasional dapat tetap tumbuh melalui berbagai kebijakan ekonomi dan program pembangunan infrastruktur nasional. Berdasarkan data *World Economic Forum* (WEF), daya saing Indonesia Tahun 2017-2018 dalam konteks global berada pada peringkat 36 dan daya saing infrastruktur sebagai salah satu faktor pengungkutnya berada pada urutan ke 52. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2016 masih tetap positif yaitu sebesar 5,02 % dengan GDP per kapita sebesar (US\$3,605) dan tahun 2017 pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10 % dan sebesar 5,4 % pada tahun 2018.

Indikasi kebutuhan investasi infrastruktur prioritas nasional tahun 2015-2019 diperkirakan dapat mencapai +Rp. 4.700 Triliun. Kondisi ini menempatkan Indonesia menjadi magnet bagi investasi konstruksi baik di ranah regional ASEAN maupun global, sehingga sektor konstruksi nasional harus mempersiapkan diri menyambut peluang dan tantangan pembangunan infrastruktur yang telah memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN semenjak awal tahun 2016 dan menyongsong perdagangan bebas AFTA tahun 2020. Tidak dapat

*Workshop Rantai Pasok Penerapan Teknologi Sumber Daya Konstruksi :*  
**KESIAPAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  
 UNTUK DUKUNG PERCEPATAN  
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**Andias Mintoharjo, ST**  
*(Subdit Material dan Peralatan Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi)*

dipungkiri, bahwa globalisasi dan teknologi telah berdampak pada ketidakpastian yang besar bagi perekonomian masing-masing negara. Pada satu sisi, semua negara dapat terhubung satu sama lain, di sisi lainnya masalah yang terjadi di suatu negara sangat sulit dihindari dampaknya bagi negara lain.

Tak hanya itu, saat ini kita dihadapkan dalam era baru dengan berbagai tantangan dan persoalan infrastruktur yang harus diselesaikan dimana sudah cukup lama infrastruktur tidak dibangun dengan kesungguhan karena lebih fokus terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuntungan materi namun mengabaikan pemerataan. Dengan kondisi ini, kita tidak bisa lagi menghadapi persoalan dengan cara-cara lama. Demikian halnya dengan sektor konstruksi nasional dimana situasi

yang dihadapi saat ini adalah terjadinya perubahan lingkungan strategis yang menuntut para pelaku jasa konstruksi untuk segera melakukan penyesuaian terhadap cara atau metode yang baru dan keluar dari zona nyaman. Tentu saja dengan kondisi tersebut membutuhkan suatu mekanisme dan pembinaan yang mampu keluar dari *business as usual*, keleluasaan bergerak, prosedur dan pelatihan baru yang lebih bertanggung jawab yang dapat memberi ruang untuk tumbuh dan berdaya guna, keberanian untuk belajar dan bereksperimen, serta ruang penyesuaian atau adaptasi yang cepat.

Pada akhirnya, proses transformasi jasa konstruksi menjadi industri konstruksi menjadi suatu keniscayaan yang menuntut penyesuaian dan kesiapan pada seluruh



persaingan saat ini bukan lagi persaingan antar perusahaan, tetapi lebih merupakan persaingan antar rantai pasoknya.

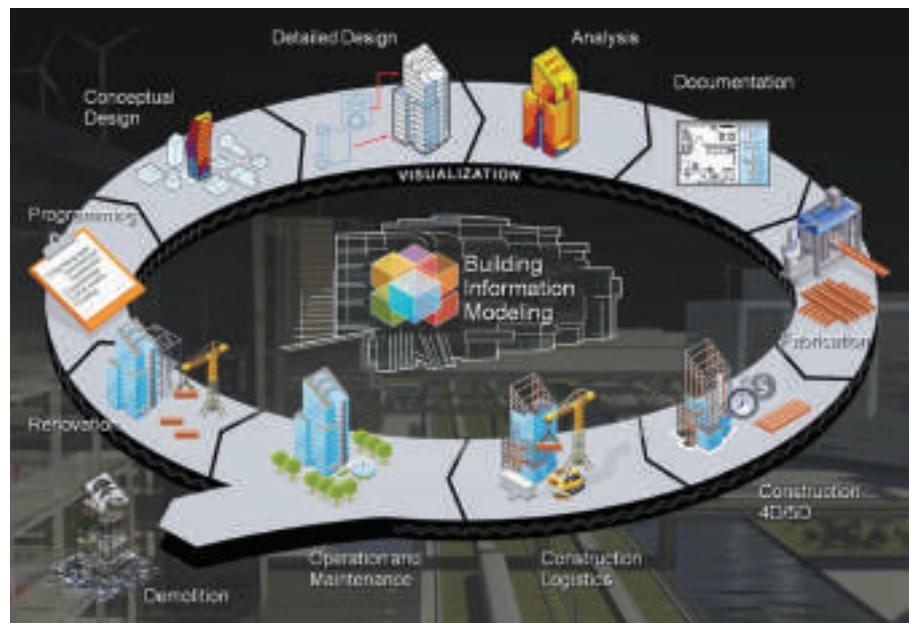
Salah satu isu strategis terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah kesiapan dan ketersediaan sumber daya konstruksi dalam negeri. Memperhatikan hal tersebut, maka pengelolaan sumber daya konstruksi yang dimulai dari tahap perencanaan proyek menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan konstruksi secara keseluruhan. Pengelolaan yang sistematis dan terencana terhadap badan usaha, biaya, waktu, sdm, teknologi, material dan peralatan perlu dilakukan

mata rantai sumber daya konstruksi guna mewujudkan industri konstruksi nasional yang berdaya saing dalam era kompetisi global berbasis manajemen rantai pasok (*supply chain management*).

Sejalan dengan perkembangan dinamika sektor konstruksi nasional, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi sebuah era baru dalam penyelenggaraan industri konstruksi nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus bekerja sama dengan seluruh *stakeholders* terkait jasa konstruksi untuk mengatur usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, yang meliputi usaha pemasok bahan bangunan, pemasok peralatan, pemasok teknologi dan pemasok tenaga kerja konstruksi sehingga kemampuan dan daya saing para pelaku pemasok sumber daya konstruksi tersebut dapat meningkat.

Dalam sambutan pembukaan *workshop*, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menekankan bahwa dalam konteks industri konstruksi kesiapan sumber daya konstruksi seperti Badan Usaha Jasa Konstruksi, biaya/ investasi, tenaga kerja/ SDM, material dan peralatan, serta teknologi mutlak diperlukan. Terselenggaranya *workshop* yang bersamaan dengan Pameran Konstruksi Indonesia 2017 tahun ini, diharapkan dapat menjadi *business plat-form* yang kuat bagi Indonesia sehingga mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor konstruksi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga menyaksikan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Asosiasi Perusahaan Konstruksi Korea (*Construction Association of Korea/ CAK*) yang bertujuan untuk meningkatkan



kompetensi dan kapasitas pekerja konstruksi Indonesia. Kerja sama ini juga mencakup pengembangan data dan sistem informasi, riset dan inovasi teknologi konstruksi, pengembangan pasar dan fasilitasi kontrak bisnis, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta kerangka kerja institusi untuk pengembangan industri konstruksi yang stabil.

Hadir sebagai narasumber utama, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Yaya Supriyatna yang menjelaskan bahwa rantai pasok dapat diartikan sebagai suatu sistem *supply manufacture*, transportasi, distribusi dan *trade* yang diciptakan untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk dan memasok produk tersebut kepada pengguna sesuai nilai yang diminta. Dengan kata lain, rantai pasok meliputi seluruh pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dalam menyediakan sumber daya mulai dari hulu sampai hilir. Dengan demikian,

secara optimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Dengan melihat tantangan dan keterbatasan kapasitas sumber daya konstruksi di atas, penyelenggaraan konstruksi membutuhkan adanya dukungan teknologi, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi tinggi sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat terealisasi, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Salah satu penerapan teknologi konstruksi yang sudah banyak digunakan saat ini adalah penggunaan sistem beton pracetak dan prategang. Ketua Umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia, Hari Nugraha Nurjaman menyampaikan bahwa industri beton pracetak dan prategang telah terbukti memberikan jaminan kontinuitas proses produksi material beton sehingga pelaksanaan konstruksi dapat terjaga dengan baik dan lebih akurat, waktu lebih cepat tetapi produk konstruksi lebih

# BERITA UTAMA

berkualitas dan aman jika dibandingkan dengan pekerjaan beton konvensional.

Dari sisi perbaikan produktivitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi, saat ini pelaksana konstruksi sudah banyak yang memperkenalkan dan menggunakan teknologi *Building Information Modeling* (BIM) dimana sebuah piranti lunak/ *software* canggih yang mampu melakukan proses berbasis model mulai dari merencanakan, mendesain, membangun, dan mengelola bangunan gedung dan infrastruktur, demikian yang disampaikan oleh Leo Yulyardi selaku pembicara dari PT. Trimble Solution Representative Office Indonesia.

Lebih lanjut, perkenalan teknologi baru yang merubah metode desain sebuah bangunan konstruksi melalui aplikasi BIM dalam kegiatan *workshop* ini dilakukan melalui demo pemodelan aplikasi. Bagaimana disaksikan bersama bahwa melalui teknologi BIM para pelaksana konstruksi dapat menggunakannya mulai dari konsep desain, detail *engineering*, konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan. Reza Desputera sebagai perwakilan narasumber dari AUTODESK INDONESIA menerangkan bahwa *Autodesk* memiliki aplikasi 3D Model khusus desain infrastruktur seperti desain jalan, jembatan, drainasi, menghitung *volume cut & fill* tanah, semuanya dapat dimulai meskipun kita tidak memiliki data awal yang lengkap.

Dalam penerapan teknologi yang selaras dengan pemanfaatan sumber daya alam dan limbah juga telah banyak diterapkan dan diuji coba untuk menjawab permasalahan keterbatasan pasokan material aspal minyak nasional. Sebagai contoh, Penggunaan Aspal Buton sebagai substitusi aspal minyak untuk pembangunan dan preservasi jalan sudah banyak diterapkan semenjak tahun 2006. Sementara itu, pemanfaatan limbah/ sampah plastik sebagai bahan campuran



aspal untuk perkerasan jalan juga telah diuji coba beberapa waktu yang lalu dan dapat menjadi salah satu solusi permasalahan limbah plastik. Demikian yang disampaikan oleh Yohanes Ronny salah satu narasumber dari Balai Bahan dan Perkerasan Jalan Pusjatan Balitbang PUPR.

Dukungan pengembangan teknologi di lingkup Kementerian PUPR melalui Balitbang saat ini juga telah banyak menghasilkan teknologi tepat guna yang sangat bermanfaat. Tidak hanya memiliki kualitas dan mutu yang handal, namun juga memiliki nilai sosio-ekonomi di masyarakat. Sebagai narasumber dari Puslitbang Jalan dan Jembatan, Hadi Gunawan Sonjaya menjelaskan bahwa teknologi Jembatan Gantung Untuk Desa Asimetris (JUDESA) telah diterapkan di beberapa wilayah dan menjadi solusi atas kebutuhan jembatan di desa. Disamping teknologi hasil litbang tersebut terdapat beberapa yang juga telah

diimplementasikan, antara lain *Corrugated Mortar Pusjatan* (CMP), Blok Beton Terkunci, Lining Saluran Modular, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), dan masih banyak lagi. Teknologi-teknologi hasil litbang PUPR tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan industri terkait sehingga dapat lebih luas digunakan dan dapat diproduksi dengan skala industri.

Selaras dengan hal tersebut, satu hal yang tak kalah penting adalah terkait dengan kompetisi di sektor konstruksi yang semakin ketat dan luas, serta pasar konstruksi yang terus meningkat dimana perusahaan konstruksi dituntut untuk mengerjakan proyek di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, pemenuhan terhadap pemasok sumber daya material yang handal pun menjadi hal yang penting guna mendukung kegiatan proyek diatas. Kendala dan kesulitan di atas, bisa diselesaikan diantaranya dengan



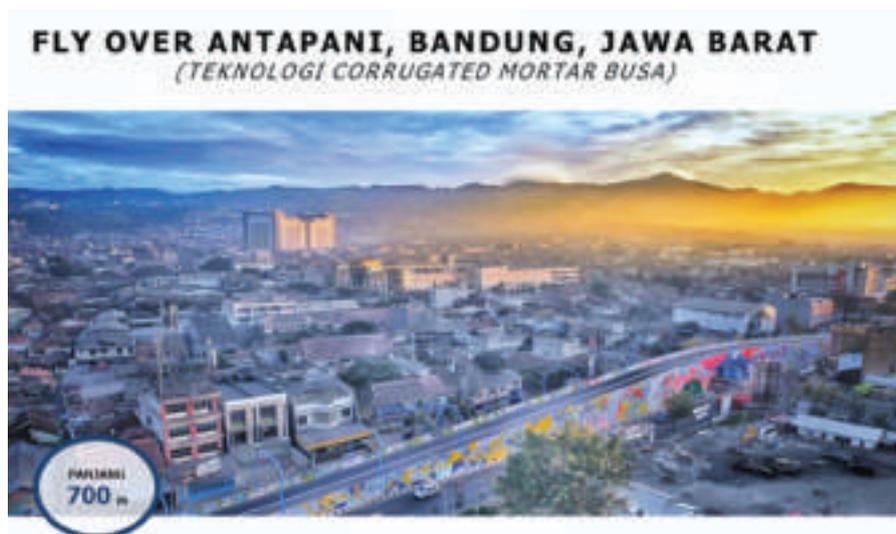
pembentukan *e-commerce* yang terintegrasi, sehingga dapat membantu khususnya bagi kontraktor kecil dan menengah untuk mendapatkan bahan bangunan dengan harga terbaik. Salah satu *startup* di *e-commerce* dengan spesialisasi bahan bangunan yang membantu perusahaan kontraktor untuk mendapatkan harga terbaik melalui jaringan pabrik dan *supplier* yang luas di Indonesia, yang menjual segala produk bahan bangunan dari pekerjaan di awal sampai pekerjaan *finishing* melalui aplikasi [www.bildeco.com](http://www.bildeco.com), demikian yang diungkapkan Errika Ferdinata sebagai salah satu narasumber dari PT Digital Niaga Abadi (BILDECO).

Berdasarkan hasil kegiatan *workshop* tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu mendapat tindak lanjut bersama sebagai berikut:

- 2) Perlunya kegiatan sosialisasi terkait informasi BIM (*Building Information Modeling*) dimulai dari Kontraktor dan Konsultan Kualifikasi Besar khususnya BUMN Karya sehingga tidak hanya didapatkan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang efisien dan efektif, tetapi juga dapat membantu mendapatkan pemasok yang berkualitas. Selain itu, pengenalan teknologi BIM diijazahi untuk diterapkan melalui pendidikan/ pelatihan peningkatan SDM di lingkungan Kementerian PUPR;
- 3) Perlunya pengkajian untuk menajaki penerapan BIM di lingkungan BUMN Karya dengan mengajak kerja sama dengan Kementerian BUMN dan

uji coba gelar aspal plastik yang telah dilakukan oleh Balitbang Kementerian PUPR di beberapa tempat untuk mendapatkan *feedback* tindak lanjut dari penggunaan aspal plastik tersebut, terutama terkait dengan kesiapan pasar dan industri dalam negeri yang dapat mendukung penggunaan aspal plastik tersebut ;

- 7) Perlunya identifikasi informasi kebutuhan material terhadap implementasi Jembatan Untuk Desa (JUDESA). Informasi ini dapat mendorong industri dalam negeri untuk mendukung ketersediaan pasokan/*supply* material jembatan Untuk JUDESA dengan bentangan 40 meter, khususnya material kabel penggantung (*cable stayed*) yang sampai saat ini masih impor. Untuk tipe JUDESA ini sudah banyak dibangun di beberapa daerah pedesaan, namun untuk jembatan dengan bentangan diatas 40 meter masih dalam tahap uji coba;
- 8) Perlunya kegiatan sosialisasi khususnya kepada kontraktor kecil dan menengah terkait *e-commerce* yang menyediakan informasi terkait material konstruksi yang salah satunya melalui aplikasi [www.bildeco.com](http://www.bildeco.com). Disamping hal tersebut perlu mendorong terbentuknya *e-market place* jasa konstruksi di Indonesia baik pada belanja swasta, BUMN dan pemerintah.\*



- 1) Perlunya pengaturan turunan dari amanat UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terkait dengan pengembangan sistem rantai pasok konstruksi, yang pengaturannya meliputi: (i) pengaturan terhadap jaminan pasokan (*Supply*) untuk memenuhi kebutuhan (*Demand*) di sektor konstruksi nasional, (ii) pengaturan terhadap kebutuhan informasi yang dapat digunakan oleh seluruh *stakeholders* konstruksi untuk mendukung rantai pasok, (iii) pengaturan dukungan teknologi agar proses usaha bisa berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas, (iv) pengaturan sumber daya konstruksi yang meliputi badan usaha, biaya/ investasi, material, peralatan, dan tenaga kerja SDM. Dengan demikian, pengaturan yang disusun dapat lebih komprehensif dan mendukung pemenuhan pasar konstruksi, baik untuk pasar konstruksi domestik

- 4) Perlunya Penerapan *Road Map* Konstruksi Digital Indonesia sesuai dengan tahapan yang dicanangkan, yaitu mulai dari adopsi, digitalisasi, kolaborasi dan integrasi;
- 5) Perlunya pedoman Tipologi Produk Beton Pracetak dan Prategang serta Tipologi Alat Pendukung Produksi dan Instalasi Beton Pracetak dan Prategang untuk dijadikan acuan bagi industri beton pra cetak dan pra tegang, pengguna jasa, kontraktor, konsultan dan *stakeholders* terkait lainnya. Dengan demikian tipologi produk beton pra cetak dan pra tegang dapat masuk ke dalam sistim pengadaan belanja pemerintah, swasta dan BUMN, seperti dimasukkan ke dalam e-katalog untuk belanja pemerintah;
- 6) Perlunya monitoring dan evaluasi hasil dari uji coba dan rencana beberapa

**"Sejalan dengan perkembangan dinamika sektor konstruksi nasional, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi sebuah era baru dalam penyelenggaraan industri konstruksi nasional"**

# Rangkaian Konstruksi Indonesia 2017 : **BILATERAL MEETING** UNTUK DUKUNG ERA BARU **INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA**

 Indri Eka Lestari

**K**onstruksi Indonesia hadir kembali di tahun 2017 ini. Ajang ini menjadi wadah berkumpulnya *stakeholders* konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri sekaligus sebagai tempat berkoordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan pasokan sumber daya konstruksi. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung pada ajang kali ini yaitu: "Era Baru Industri Konstruksi Indonesia". Tema ini diambil bertepatan dengan telah lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2017 yang membawa harapan baru pada industri konstruksi di Indonesia. Harapan baru yang dimaksud adalah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui Undang-Undang ini, sektor jasa konstruksi digiring ke arah baru yaitu penguatan *stakeholder* Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan.

Tidak hanya dihadiri oleh para pelaku usaha bidang konstruksi dalam negeri, Konstruksi Indonesia 2017 juga menghadirkan berbagai perusahaan dan *stakeholder* terkemuka dari luar negeri untuk saling bertukar informasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan terkini bidang konstruksi.

Di sela-sela penyelenggaraan Konstruksi Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengawas dan pelaksana tugas dalam bidang infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan pertemuan *bilateral meeting* dengan *stakeholder* dari *Turkiye Construction Equipment Distributors & Manufacturers Association* (IMDER) dan CIDB Malaysia.

Melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, beberapa



pewaklan IMDER bertemu langsung dengan Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Danis Sumadilaga. IMDER yang merupakan asosiasi konstruksi yang bergerak pada sektor peralatan konstruksi bertemu dan menyampaikan langsung tentang potensi kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang konstruksi dan manufaktur.

Dalam pertemuan tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR memberikan fokus kerja sama dalam bidang pemenuhan energi listrik, juga rental alat-alat berat konstruksi. Bidang ini menjadi salah satu medan magnet bagi dunia konstruksi Internasional, mengingat sedang masifnya pemerintah saat ini melakukan pembangunan infrastruktur dari Sumatera hingga ke Papua.

Pertemuan ini diapresiasi oleh Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Danis

Sumadilaga, dimana diharapkan pertemuan seperti ini menjadi langkah awal terciptanya kerja sama antara *stakeholder/asosiasi* asing dengan asosiasi/*stakeholder* Indonesia.

Hal serupa disampaikan oleh Yusuf dari pihak IMDER yang mengatakan Turki/IMDER saat ini memiliki kiprah yang saat baik dalam bidang industri konstruksi, tidak kalah dengan negara-negara Eropa, ditambah lagi hubungan Indonesia dengan Turki yang berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dapat melakukan kerja sama terutama dalam bidang konstruksi.

Pertemuan ini merupakan pertemuan balasan yang sebelumnya, dimana IMDER pernah mengundang Ditjen Bina Konstruksi pada acara *The 2<sup>nd</sup> International Construction Equipment Congress*, di Istanbul Turki pada 20 – 21 Oktober 2016. Dalam pertemuan tersebut IMDER dengan Ditjen Bina Konstruksi menyepakati tentang penerapan teknologi, penelitian dan pengembangan sektor konstruksi. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan kerja sama dengan Penandatanganan *Momorerendum of Understanding* (MoU) antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan

**"Undang-undang No.2 Tahun 2017  
adalah untuk mendukung percepatan  
pembangunan Infrastruktur"**

IMDER Turki pada 21 Oktober 2016.

Pada perjanjian tersebut Ditjen Bina Konstruksi dan IMDER menyepakati penelitian dan pengembangan, penerapan dan alih teknologi dan pengembangan industri alat berat konstruksi.

Selanjutnya, Plt. Direktur Bina Konstruksi Danis Sumadilaga menerima pertemuan *bilateral meeting* dengan *Construction Industry Development Board* (CIDB) dari

Indonesia.

Pada pertemuan tersebut CIDB menyampaikan keinginannya memperpanjang perjanjian kerja sama di bidang sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang berada di Malaysia. Dengan pengajuan *training of trainer* di Indonesia maupun Malaysia, Malaysia berencana melakukan *Joint Venture Training Academy* di Indonesia.

Sementara itu, Danis Sumadilaga

menyampaikan apresiasi kepada CIDB yang telah cukup lama bekerja sama dengan Indonesia khususnya dalam bidang tenaga kerja konstruksi Indonesia untuk bisa bekerja di Malaysia.

Danis melanjutkan dengan memberikan saran kepada pihak CIDB Malaysia untuk memperdalam informasi terkait proyek apa saja yang diunggulkan oleh pemerintah saat ini seperti : pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jalan tol, dan penyediaan air minum.

Pihak CIDB juga menyampaikan bahwa Malaysia saat ini tengah melakukan berbagai terobosan bidang teknologi konstruksi, dan mengharapkan kerja sama yang bisa dilakukan di Indonesia. Serupa dengan Malaysia, Indonesia saat ini juga tengah mempergunakan teknologi terbaru yang sedang dikembangkan dalam pengerjaan proyek konstruksi, seperti aspal plastik, yang diharapkan bisa menjadi perhatian seluruh *stakeholder* konstruksi dalam dan luar negeri.

Tahun 2017 ini diharapkan Indonesia melalui LPJK dan CIDB Malaysia dapat mengeluarkan sertifikat bersama yang membuktikan kompetensi tenaga kerja konstruksi terutama tenaker konstruksi Indonesia yang saat ini tengah bekerja di Malaysia, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya untuk bekerja di berbagai negara lainnya.

Melihat sambutan yang baik dari berbagai *stakeholder* bidang konstruksi baik dari dalam maupun dari luar negeri tentang kondisi industri Indonesia dapat menjadi salah satu bukti bahwa industri konstruksi Indonesia tengah menjadi buah bibir di mata *stakeholder* dunia.

Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2017 diharapkan dapat menjadi kesempatan bertambahnya investor yang tertarik untuk melakukan bisnis dan menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak hanya para investor luar negeri, para pe-

ngusaha/swasta Indonesia juga diharapkan mau untuk meningkatkan derajat mereka menjadi seorang investor yang terlibat dalam pembangunan sektor infrastruktur Indonesia.\*

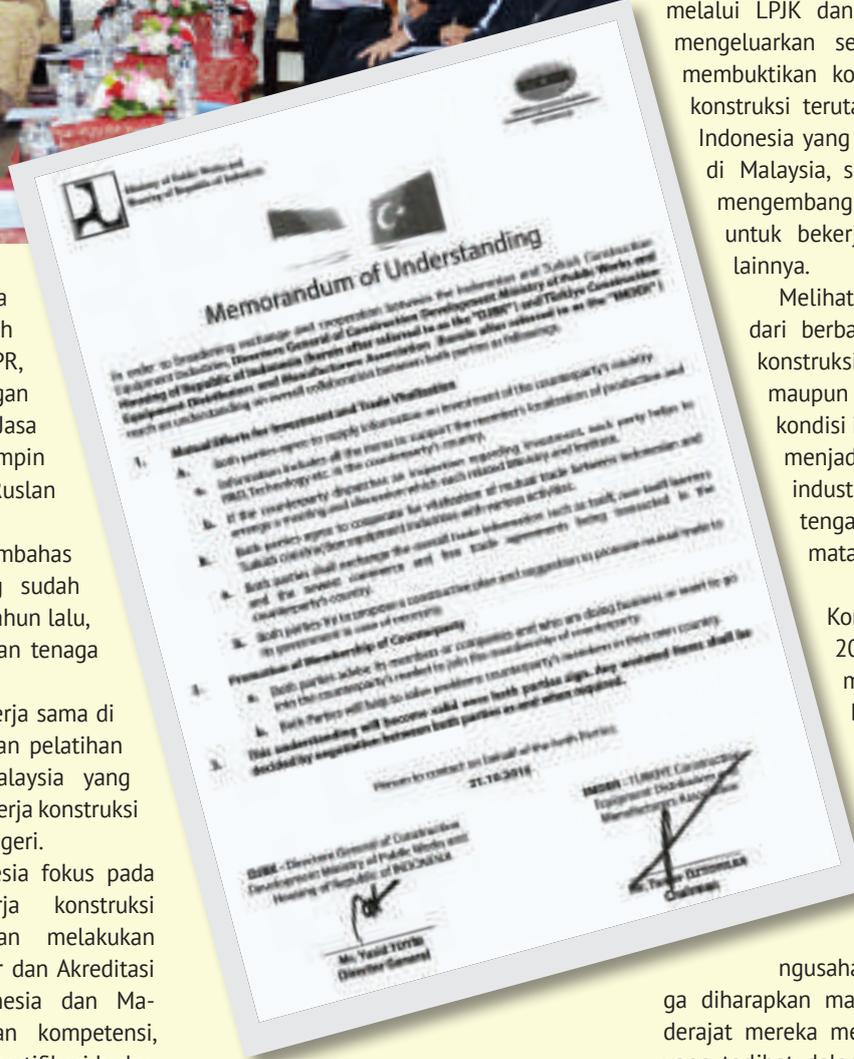


Malaysia. Tidak hanya bertemu dengan pemerintah yaitu Kementerian PUPR, CIDB juga bertemu dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang dipimpin oleh Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai.

Pertemuan tersebut membahas tentang kerja sama yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, khususnya pada peningkatan tenaga kerja konstruksi.

Pada awal perjanjian kerja sama di tahun 2014, sudah dilakukan pelatihan dan uji sertifikasi di Malaysia yang membuka peluang tenaga kerja konstruksi Indonesia bekerja di luar negeri.

Di tahun 2015, Indonesia fokus pada percepatan tenaga kerja konstruksi bersertifikat yaitu dengan melakukan *training of trainer* Instruktur dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Indonesia dan Malaysia, harmonisasi bakuan kompetensi, standarisasi pelatihan dan sertifikasi kedua negara, serta pelatihan dan uji sertifikasi di



# INDONESIA ECONOMY AND INFRASTRUCTURE OUTLOOK 2018

**B**elum lama ini kita mendengar dan melihat bersama, salah satu retail terbesar di Indonesia yaitu "Matahari" menutup gerainya di beberapa pusat perbelanjaan seperti di Blok M dan Manggarai. Perusahaan retail Indonesia tersebut juga berencana akan menutup kembali dua gerainya pada Desember 2017 di salah satu pusat perbelanjaan besar di Jakarta dan Lombok. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi dan pergeseran pola belanja masyarakat.

Tidak hanya itu, negara-negara lain juga mengalami kondisi yang sama. Baru-baru ini kita mendengar bahwa salah satu gerai ternama dunia yang berasal dari Spanyol "Zara" memutuskan untuk menutup gerainya di Robina Town Centre, Australia. Kondisi yang sama juga terjadi di pasar retail Amerika Serikat, jaringan gerai retail Sears Holding memutuskan menutup 140 gerainya di seluruh wilayah Amerika Serikat. Hal ini didorong oleh penurunan penjualan yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Inggris sebagai salah satu pusat retail dan mode dunia mulai berhati-hati terhadap kondisi yang terjadi pada pasar retail di beberapa negara. Menjelang akhir tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Inggris mengalami suatu kondisi yang cukup unik dimana pertumbuhan upah mengalami stagnansi serta adanya efek Brexit sehingga menimbulkan ketidakpastian publik untuk membelanjakan uangnya. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang tidak mengalami peningkatan atau dengan kata lain stagnan.

Perekonomian dunia saat ini memang berada pada posisi kondisi yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Salah satu yang menjadi perhatian global ialah tren penurunan daya beli masyarakat di beberapa negara sehingga perlu diantisipasi mengingat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2017 berada pada posisi 3,6%



naik hanya 0,4% dari tahun 2016 pada periode yang sama. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III Tahun 2017 tercatat 5,06%, lebih baik jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Angka ini memang lebih kecil jika dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia sebesar 5,1%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dipengaruhi oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi serta konsumis yang relatif terjaga. Berdasarkan laporan Bank Indonesia pada 6 November 2017, investasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dimana telah mencapai level tertinggi sejak triwulan I 2013. Pertumbuhan ini didukung oleh investasi bangunan dan non-bangunan. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi pendorong utama terhadap peningkatan investasi bangunan baik oleh pemerintah maupun peran sektor swasta. Disamping itu, Pemerintah Indonesia cukup berhati-hati terhadap kondisi konsumsi masyarakat dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh sedikit lebih rendah jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Belum lagi, kondisi perusahaan retail

besar Indonesia yang mengambil langkah untuk menutup gerai mereka di beberapa pusat perbelanjaan. Hal ini juga menjadi kekhawatiran terhadap perusahaan retail lainnya yang akan mengalami kondisi yang sama.

Akan tetapi Pemerintah Indonesia masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV pada tahun 2017 dengan prediksi mencapai 5,1%. Optimisme ini ditunjukkan melalui target penyelesaian pembangunan infrastruktur hingga tahun 2017. Selain itu, percepatan reformasi *structural* perekonomian dan iklim investasi yang semakin kondusif akan meningkatkan nilai investasi bangunan maupun non bangunan. Perbaikan kinerja ekspor dan perbaikan ekonomi dunia hingga akhir tahun 2017 akan menutup pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level yang memuaskan.

Lalu bagaimana dengan tahun 2018? Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 5,3%. Angka ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi semakin membaik dan kondisi domestik yang semakin menguat sebagai efek dari reformasi perekonomian yang



terus berlanjut. Selain itu, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia (*ease of doing business*) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business* (EODB) untuk 2018 yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari peringkat ke-91 pada tahun 2017. Hal ini diharapkan

terus melanjutkan proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan percepatan penyediaan infrastruktur. Sektor konstruksi sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia, ditargetkan akan mengalami pertumbuhan 6,7%-7,1% yang didukung oleh pembangunan infrastruktur sebesar 90%

Salah satu langkah konkret yang diambil Pemerintah ialah dengan mengeluarkan kebijakan "Program Padat Karya Cash". Kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden dan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2018. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mengoptimalkan alokasi dana desa pada penyediaan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Kementerian yang diberikan amanat untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia telah menyusun program-program pembangunan yang akan mendukung kebijakan tersebut. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11,38 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Padat Karya). Program ini ditargetkan akan mampu menyerap tenaga kerja ± 400.000 orang dan diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat. Program ini nanti akan mempercepat penyediaan infrastruktur bagi masyarakat khususnya yang ada di pedesaan dan kawasan perbatasan lainnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap menyediakan infrastruktur secara merata sehingga akan memberikan *multiplier effect* bagi sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu,

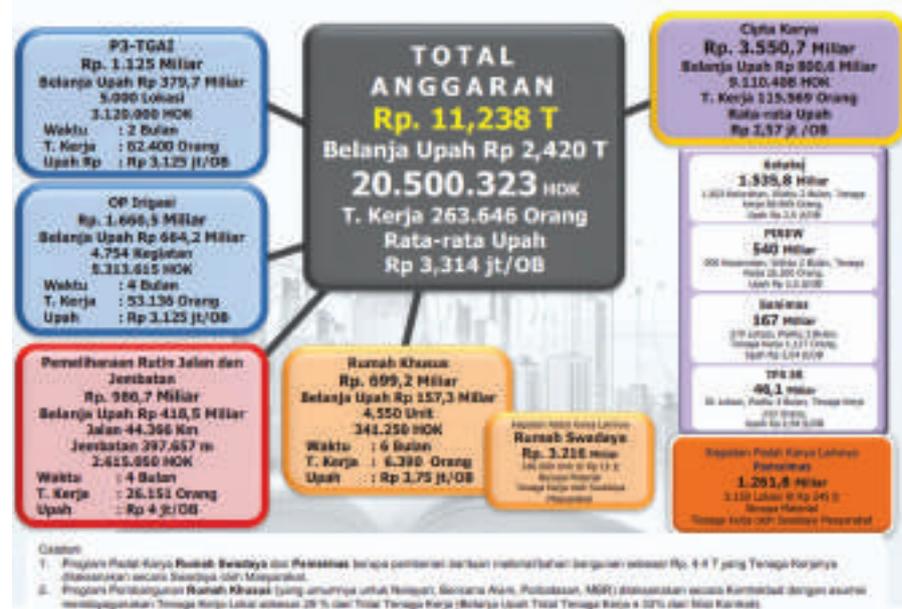


Gambar 1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2018

dapat mendorong laju pertumbuhan investasi bangunan maupun non-bangunan dari luar negeri semakin besar mengingat iklim usaha di Indonesia yang mulai membaik serta komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan dan layanan bagi pelaku usaha. Selain itu, pertimbangan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 juga merujuk pada peningkatan kepercayaan investor kepada Indonesia yang didukung oleh kenaikan peringkat *standard & poor's* dan realisasi konsumsi sektor swasta yang semakin menguat.

Optimisme Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 terlihat jelas pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018. Pemerintah Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,2%-5,6% yang akan didorong oleh peningkatan domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 6,0%-6,6% dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1%-5,2% pada tahun 2018.

Dalam kerangka kebijakan, Pemerintah



Gambar 1. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Padat karya) Kementerian PUPR Tahun 2018

dari target program pemerintah tercapai. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang nantinya diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

tahun 2018 merupakan tahun emas bagi Indonesia karena segala optimisme dan harapan positif yang ditunjukkan melalui dukungan semua pihak baik pemerintah itu sendiri, pelaku usaha, investor asing, serta masyarakat Indonesia. •

## TKDN Kebijakan Strategis Untuk Meningkatkan Peran Nasional dalam Industri Konstruksi

*“Untuk memperkuat industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di dalam negeri, maka pemerintah harus terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Oleh karena itu, TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten bukan sekedar kebijakan administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik di Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun di Badan usaha Milik Negara (BUMN)”*

- Presiden Jokowi, Ratas Evaluasi Penerapan TKDN

### TKDN sebagai Kebijakan Strategis

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang lebih dikenal dengan singkatan TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase. Kebijakan TKDN saat ini menjadi salah satu kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan peran nasional, khususnya penggunaan produk-produk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. TKDN ini juga bukan sekedar upaya pemerintah dalam

menekan impor, lebih dari itu, TKDN juga diharapkan bisa menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri.

TKDN juga akan berdampak kepada pelaku usaha domestik sebagai faktor pengungkit agar lebih berdaya saing. Kementerian PUPR sebagai salah satu penyandang dana APBN terbesar di tahun 2017, dan akan meningkat di tahun 2018, menjadi salah satu kementerian yang diharapkan berperan besar dalam penggunaan komponen dalam negeri di seluruh proyek infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan. Seperti Program Sejuta Rumah dari pemerintah, mempunyai potensi pasar dalam volume cukup besar, belum termasuk yang dibangun oleh swasta. Diharapkan dengan semakin banyaknya proyek-proyek strategis dan infrastruktur yang merata di wilayah Indonesia dapat menumbuhkembangkan industri dan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja, peningkatan pajak, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.

### Landasan Hukum Kebijakan TKDN Secara Umum

Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok

sumber daya konstruksi yang diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor konstruksi mendorong penggunaan komponen dalam negeri untuk mendukung daya saing infrastruktur.

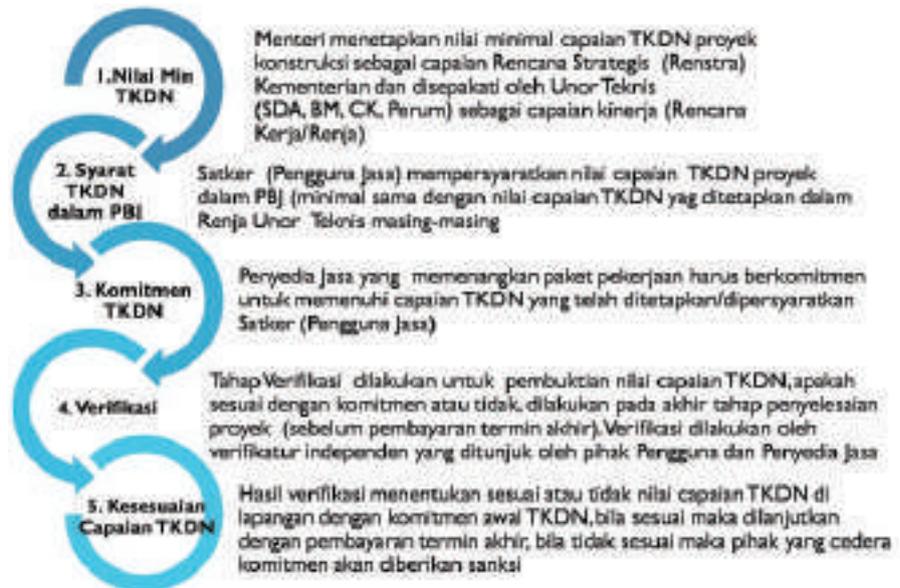
Untuk mendukung kebijakan TKDN ini pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menghimbau kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan



langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perkerjasama nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional. Inpres tersebut ditujukan dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri, serta untuk melindungi tenaga kerja serta produk-produk dalam negeri. Kementerian Perindustrian sebagai *leading* sektor produk dalam negeri sudah menyusun kebijakan dasar tentang TKDN, antara lain:

1. Permen Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
2. Permen Perindustrian No 17/M-IND/PER/2/2011 Pembentukan POKJA dan Sekretariat TIM-NAS P3DN
3. Permen Perindustrian No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
4. Permen Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai dari APBN / APBD.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional, kebijakan TKDN diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dalam Perpres No. 4 Tahun 2015. Di Kementerian PUPR sendiri pengadaan



barang/jasa diatur dalam Permen PU No. 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana diubah terakhir dengan Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015.

Saat ini kebijakan TKDN di Kementerian PUPR belum dilakukan secara maksimal, dan terpetakan nilai TKDN, hanya sebatas persyaratan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan TKDN di PUPR antara lain: belum dipersyaratkan TKDN dalam proses pengadaan, tidak adanya tahap verifikasi komitmen TKDN di akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tata cara perhitungan TKDN umum perindustrian perlu disesuaikan dengan karakteristik proyek pekerjaan konstruksi PUPR, material dan peralatan sektor jasa konstruksi masih sedikit yang memiliki sertifikat nilai TKDN, serta belum adanya perangkat pelaksanaan kebijakan TKDN.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan TKDN di PUPR saat ini, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi yang memiliki tupoksi dalam pembinaan produk dalam negeri sedang menyusun rancangan pengaturan TKDN di sektor PUPR yang direncanakan bisa dilaksanakan pada tahun 2018.

### Konsep Pengaturan TKDN Sektor PUPR

Pengguna jasa menetapkan minimum nilai TKDN dalam suatu pengadaan barang dan jasa, kemudian penyedia jasa dengan melakukan perhitungan mandiri atau dengan bantuan surveyor independen, menghitung nilai TKDN dan memasukkannya dalam dokumen penawaran.

Disamping itu, pada 2015 telah

dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Perindustrian dan Kepala BPKP tentang Pengawasan Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Kantor Wakil Presiden.

Dalam menyusun konsep rancangan pengaturan TKDN ini, banyak diadopsi prinsip pengaturan TKDN di Kementerian ESDM khususnya di sektor kelistrikan, minyak dan gas. Karakteristik produk infrastruktur di tersebut memiliki persamaan dengan produk infrastruktur bidang PUPR.

Menyusun kebijakan TKDN ini bukan hanya sekedar menyusun suatu peraturan teknis, namun juga membangun suatu sistem pelaksanaan TKDN. Sistem pelaksanaan TKDN ini terdiri atas: pedoman dan standar perhitungan, tim penanggung jawab, sistem informasi, dan pihak penilai (verifikatur).

Dalam tata cara perhitungan TKDN, ada 3 jenis perhitungan nilai TKDN, yaitu:

1. TKDN pada Barang
2. TKDN pada Jasa
3. TKDN pada gabungan barang dan jasa.

Untuk proyek pekerjaan konstruksi di PUPR, jenis perhitungan yang digunakan adalah perhitungan TKDN pada gabungan barang dan jasa. Selanjutnya tata cara perhitungan TKDN proyek konstruksi ini disesuaikan dengan format Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang digunakan dalam menghitung besaran rencana biaya konstruksi.

Konsep penting dalam rancangan pengaturan TKDN ini antarlain:

1. Penetapan capaian nilai TKDN Kementerian PUPR.

Sektor PUPR memiliki banyak sub sektor





dengan karakteristik tersendiri, yaitu Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan. Nilai capaian TKDN diserahkan ke sub sektor masing-masing yang dituangkan dalam renstra kementerian dan diturunkan dalam renja sub sektor masing-masing.

2. Memasukkan syarat TKDN dalam sistem pengadaan barang dan jasa kementerian Nilai TKDN dijadikan sebagai syarat dalam pengadaan barang dan jasa, pihak pengguna mensyaratkan nilai TKDN minimal tertentu dan harus dipenuhi oleh para peserta lelang.
3. Adanya tahap verifikasi kesesuaian nilai komitmen TKDN dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi Dalam proses penyelenggaraan proyek konstruksi, di awal sudah ditetapkan komitmen nilai TKDN minimal sama dengan yang dipersyaratkan oleh pengguna jasa (*owner*), yang selanjutnya akan diverifikasi nilainya pada akhir tahap pelaksanaan. Hasil dari tahap verifikasi ini adalah kesesuaian antara komitmen dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, yang selanjutnya menjadi salah satu dasar pembayaran akhir oleh pengguna ke penyedia jasa.
4. Pengaturan pihak dan kriteria Verifikatur TKDN Pihak yang melakukan verifikasi adalah verifikatur TKDN. Verifikatur ini adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menghitung nilai TKDN proyek konstruksi.
5. Sistem *reward and punishment* dalam penerapan TKDN Untuk efektivitas penerapan kebijakan TKDN ini perlu adanya penghargaan serta sanksi.
6. Pembentukan Tim Percepatan Peng-

gunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tim P3DN Kementerian PUPR adalah Tim *ad hoc* yang bertanggungjawab terhadap penerapan kebijakan TKDN di lingkungan PUPR.

Pada prinsipnya, adanya pengaturan TKDN dalam proyek konstruksi ini tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan proyek konstruksi infrastruktur di PUPR, baik dari segi waktu dan biaya. Oleh sebab itu, sebelum diterapkan kebijakan ini, pihak pemrakarsa kebijakan TKDN sudah harus melengkapi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penerapan TKDN ini, salah satunya adalah ketersediaannya pihak penilai TKDN atau verifikatur. Beberapa bimbingan teknis tentang tata cara perhitungan TKDN sudah dilakukan, khususnya kepada para pegawai Satker Teknis di lingkungan PUPR. Diharapkan para peserta bisa menghitung secara mandiri (*self assessment*) nilai TKDN proyek konstruksi yang akan dilelangkan atau pun yang telah dilaksanakan.

Selain itu untuk menetapkan nilai capaian TKDN di proyek konstruksi, perlu adanya sample penilaian mandiri terhadap proyek-proyek konstruksi yang telah dilaksanakan di PUPR. Tahun 2016, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi bekerja sama dengan Surveyor Indonesia sudah dilakukan kajian penilaian TKDN proyek konstruksi di beberapa proyek PUPR. Berikut hasil penilaian TKDN di proyek konstruksi PUPR.

Penilaian mandiri ini dilakukan dengan asumsi bahwa seluruh material dan peralatan yang digunakan dalam proyek dihitung nilai TKDNnya secara mandiri, tidak tergantung dengan ada tidaknya sertifikat TKDN barang. Diharapkan dengan adanya

## "Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan TKDN di PUPR saat ini, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi sedang menyusun rancangan pengaturan TKDN di sektor PUPR yang direncanakan bisa dilaksanakan pada tahun 2018"

sample hasil perhitungan TKDN proyek ini bisa memberikan gambaran sementara capaian TKDN di Kementerian PUPR.

### Penutup

Kebijakan TKDN ini jangan sampai menghambat tugas besar Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, baik dari segi waktu maupun biaya. Hal yang mendasar dalam konsep kebijakan ini adalah masuknya pengaturan TKDN dalam sistem pengadaan barang dan jasa sehingga perlu kesiapan semua pihak dan kesiapan instrumen pelengkap kebijakan TKDN. Rancangan kebijakan TKDN bidang PUPR ini direncanakan akan selesai pada tahun 2018, secara paralel akan dibentuk dan dilengkapi seluruh instrumen-instrumen pelengkap kebijakan TKDN.

Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran terbesar dapat menghasilkan produk infrastruktur yang besar pula, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Diharapkan dengan adanya optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri di setiap proyek konstruksi dapat memberikan efek pengungkit bagi industri konstruksi secara khusus dan industri nasional secara umum, serta memberikan efek domino dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. •

# MENCETAK TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG KOMPETEN

Melalui Program Sinergi Pendidikan SMK dengan Dunia Industri (*Link and Match*)

 Niken Dwi Pramesti

Pendidikan vokasi, khususnya SMK merupakan pendidikan yang dikhususkan pada penguasaan keterampilan dan bertujuan untuk menghasilkan lulusan tenaga kerja terampil yang siap kerja. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan realita yang ada. Menurut data BPS per bulan Februari 2017, menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh tenaga kerja lulusan SMK, yaitu sebesar 9,27%. Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%, Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%.

Rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK tersebut, disebabkan oleh adanya kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Kualitas lulusan SMK yang tidak memenuhi kualifikasi kebutuhan dunia kerja ini menjadi permasalahan dan menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan bersama oleh pemerintah, dunia pendidikan maupun dunia industri.

Sebagai salah satu wujud keseriusan penanganan permasalahan ini, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam Inpres tersebut, terdapat empat poin yang menjadi fokus revitalisasi SMK, meliputi revitalisasi kurikulum, tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan. Dengan dilakukannya revitalisasi SMK, diharapkan dapat menghasilkan kualitas lulusan SMK dan mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia.

Di sisi lain, seiring dengan telah terbitnya UU No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi, pemerintah mewajibkan kepada setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan untuk Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi



**"Pada tahun 2017 ini, telah terpilih sebanyak 13 SMK untuk dijadikan pilot project atau try out dalam pelaksanaan sinkronisasi kurikulum untuk 2 bidang studi"**

yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Hal ini tentu menjadi landasan yang kuat untuk pemerintah, khususnya Kementerian PUPR untuk melaksanakan sinergi terhadap lulusan SMK bidang konstruksi agar dapat siap kerja pada proyek-proyek konstruksi.

SMK bidang konstruksi yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan akan disinergikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia industri yang tercermin melalui SKKNI

Bidang Jasa Konstruksi. Dalam rangka mencapai keterhubungan dan sinergi antara SMK dan dunia industri, diperlukan peran serta dari berbagai pihak. Kementerian PUPR dalam hal ini bertanggung jawab dalam memberikan kemudahan akses bagi siswa untuk melakukan praktik kerja lapangan, dan program pemagangan industri bagi tenaga kependidikan, memfasilitasi ketersediaan SKKNI dan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, memfasilitasi penyusunan

# LIPUTANKHUSUS

skema sertifikasi, pengembangan lembaga sertifikasi profesi (LSP) dan tempat uji kompetensi (TUK), melakukan penyelerasan sistem administrasi sertifikasi keterampilan kerja (SKTK) dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait baik dari akademisi ataupun industri dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan/pemagangan.

Sementara itu, sinergi dunia pendidikan dan dunia industri tidak terlepas dari peran serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam hal ini, Kemendikbud bertanggung jawab dalam menyusun skema sertifikasi dan pengembangan LSP, memfasilitasi kegiatan pendidik dan pelatihan kompetensi peserta didik, pendidikan dan pelatihan asesor atau instruktur, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta pelatihan, pemagangan dan atau peserta uji kompetensi, melakukan harmonisasi kurikulum dan modul dengan skema sertifikasi dan kebutuhan industri. Bagi dunia industri, peran dalam mensinergikan dunia pendidikan dan dunia usaha, dilakukan dengan menyediakan dan memfasilitasi program pemagangan serta bekerja sama dengan dunia pendidikan terkait penyediaan lulusan SMK berkualitas untuk dapat bekerja pada proyek-proyek konstruksi.

Berbagai langkah dalam mensinergikan dunia pendidikan dan dunia industri telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai wujud

nyata dalam penciptaan SDM konstruksi yang kompeten.

Melalui program *link and match*, siswa dibekali melalui kurikulum yang sudah berbasis industri. Tujuannya adalah siswa saat lulus akan mendapatkan dua ijazah, yakni ijazah akademis dan sertifikat kompetensi. Sebagai langkah awal, telah dilakukan pemetaan kebutuhan industri konstruksi akan profesi atau kompetensi yang dibutuhkan. Pemetaan ini dilakukan bersama dengan menggandeng Badan Usaha pada proyek konstruksi terkait kebutuhan jabatan kerja beserta kualifikasi yang dibutuhkan agar lulusan SMK Bidang Konstruksi dapat memenuhi kebutuhan industri konstruksi.

Harmonisasi kurikulum sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dari 592 SMK Bidang Konstruksi, terdapat dua jurusan yang paling banyak dimiliki oleh SMK Bidang Konstruksi, yaitu teknik gambar bangunan dan teknik konstruksi batu beton. Harmonisasi terhadap kedua kurikulum tersebut telah dilakukan baik dengan SMK, Badan Usaha, Kemendikbud serta Kementerian PUPR. Selanjutnya, pada tahun 2015, telah dilakukan pula pengesahan 9 skema sertifikasi bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Skema ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kurikulum SMK bidang konstruksi sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMK dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dan kebutuhan industri konstruksi serta meningkatkan mutu dari lulusan SMK.

Selain itu, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

(LSP-P1). Penyiapan LSP-P1 mencakup fasilitasi penyiapan asesor, penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan penyiapan Materi Uji Kompetensi. Sebagai upaya lain pembentukan LSP di SMK, telah dilakukan pula fasilitasi pencetakan asesor sebanyak 522 asesor yang berasal dari guru SMK.

Untuk mendukung keberhasilan *link and match* ini, tidak hanya cukup upaya dari pemerintah, pihak SMK pun juga harus berbenah diri dan berupaya untuk melakukan perbaikan dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana tempat praktik siswa (*laboratorium/workshop*) sebagai sarana untuk menunjang proses pembelajaran, serta menjalin kerja sama dengan penyedia lapangan kerja.

Pada tahun 2017 ini, telah terpilih sebanyak 13 SMK untuk dijadikan *pilot project* atau *try out* dalam pelaksanaan sinkronisasi kurikulum untuk 2 bidang studi, yaitu teknik gambar bangunan dan teknik konstruksi batu beton. Ketiga belas SMK tersebut terpilih dikarenakan memiliki jumlah siswa yang terbanyak sehingga berpotensi untuk menghasilkan 1.322 lulusan berkompoten.

Untuk mendukung pelaksanaan *try out* kepada 13 SMK tersebut, telah dilakukan *monitoring* terkait identifikasi kesiapan sarana dan prasarana melalui metode kuesioner, observasi dan wawancara. Hasil *try out* tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kurikulum terhadap hasil uji kompetensi dan profil lulusan sekolah. Dalam waktu dekat, akan segera dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pengajar. Dengan adanya upaya tersebut, para tenaga pengajar diharapkan agar dapat mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti uji kompetensi.

Kedepannya, masih banyak upaya-upaya yang harus dilakukan dalam melaksanakan program *link and match* ini. Penyediaan sarana pemagangan pada proyek-proyek konstruksi bagi siswa, dan tenaga kependidikan masih menjadi tugas bersama yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan pencetakan lulusan SMK yang siap kerja. Sinergitas dunia pendidikan dan dunia industri tidak hanya dilakukan sebatas pada lulusan SMK saja, melainkan sinergi pada pendidikan vokasi lainnya seperti politeknik dan universitas. Untuk itu, dengan peran dukungan pemerintah, dunia pendidikan dan dunia industri, diharapkan terjadi sinergi dalam menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten sehingga menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.\*





# DITJEN BINA KONSTRUKSI MENOREHKAN PRESTASI Pada Rangkaian Hari Bhakti Kementerian PUPR

 I Made Widiantara

**K**ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah berbahagia karena tepat pada 3 Desember 2017 berusia 72 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Kementerian PUPR tidak pernah lelah untuk membaktikan karya-karyanya dalam membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat seperti jalan, jembatan, jalan tol, waduk, hingga perumahan untuk masyarakat Indonesia.

Diantara kerja keras yang siang malam dilakukan insan-insan PUPR, Kementerian PUPR menyelenggarakan berbagai perlombaan menarik untuk menyatukan dan membakar kembali semangat kebersamaan dan kerja sama antar unit organisasi di Kementerian PUPR.

Sebagai salah satu unit organisasi Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi

juga turut terlibat dalam berbagai perlombaan yang digelar, seperti paduan suara, futsal, bulutangkis, tenis meja, tenis, dan senam poco-poco. Dari beberapa perlombaan yang diikuti Tim Ditjen Bina Konstruksi berhasil menorehkan prestasi dan keluar sebagai juara, antara lain :

## I. Paduan Suara

Lomba Paduan Suara Kementerian PUPR baru dilaksanakan pertama kali di tahun 2016. Ditjen Bina Konstruksi sebagai salah satu unit organisasi mengikuti perlombaan tersebut dan keluar sebagai Juara I di tahun 2016 lalu. Memegang gelar juara, Ditjen Bina Konstruksi mendapat tekanan untuk bisa mempertahankan posisi pertama.

Dengan tekanan tersebut, Tim Paduan Suara Ditjen Bina Konstruksi berusaha keras untuk mempertahankan gelar juara

dengan rutin mengikuti latihan yang setiap dua kali dalam seminggu dibawah pelatih profesional Bapak Mindo yang juga menjadi pelatih Paduan Suara Tim Paduan Suara Kementerian PUPR yang bernama Gema Sapta Taruna.

Dengan 21 perwakilan para pekerja yang berada Unit Organisasi Ditjen Bina Konstruksi akhirnya tiba di hari pementasan. Dimana, seluruh pegawai dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarief Baharuddin ikut menyaksikan bersama para pejabat

**"Ditjen Bina Konstruksi sebagai Juara I paduan suara di tahun 2016 lalu, mendapat tekanan untuk bisa mempertahankan posisi juara bertahan"**

# LIPUTANKHUSUS



tinggi Pratama Kementerian PUPR dan Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti.

Tampil di nomor urut dua, Tim Paduan Suara Ditjen Bina Konstruksi berjalan tegap dengan senyuman dan percaya diri untuk memamerkan nyanyian merdu berkelompok ini. Dengan pimpinan konduktor Moses dari Direktorat Kerja sama dan Pemberdayaan, tim berdiri membentuk formasi yang sudah dilatih sejak latihan.

Menyanyikan tiga lagu yaitu Mars Kopri, Mars PU, dan lagu daerah tim paduan suara berhasil memukau para penonton yang hadir termasuk Sekjen Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, dan Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR.

Riuh tepuk tangan penonton menggema memberikan semangat dan

merasa bangga dengan penampilan 21 orang Tim Paduan Suara DJBK. Bahkan Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin pun turut memberikan apresiasi dengan berjabat tangan dan mengucapkan terima kepada para peserta tim paduan suara setelah selesai bernyanyi di belakang panggung.

Tidak hanya diikuti oleh unit organisasi pusat Kementerian PUPR, perlombaan paduan suara ini juga mendapat perhatian



dari seluruh Balai dan Kantor Wilayah Kementerian PUPR di seluruh Indonesia yang mengirimkan aksi paduan suaranya melalui video yang di tonton pada saat perlombaan berlangsung.

Waktu yang di tunggu-tunggu pun tiba, peserta dan pendukung pun berkumpul memenuhi auditorium Kementerian PUPR tempat pelaksanaan lomba. Sembari meneriakkan jargon-jargon andalan mereka, tiba saatnya MC mengumumkan pemenang lomba paduan suara.

Dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus berbangga karena keluar sebagai Juara ke-II dalam perlombaan paduan suara tahun 2017. Raut wajah kecewa namun bersyukur karena kembali keluar sebagai salah satu yang terbaik di perlombaan tahunan ini.

Semoga dengan kerja sama tim dan latihan yang lebih intensif lagi, Ditjen Bina Konstruksi bisa kembali merebut posisi puncak perlombaan paduan suara di tahun 2018 mendatang. Semangat DJBK !

## II. Bulutangkis

Di Indonesia cabang olahraga bulutangkis menjadi salah satu cabang olahraga favorit setelah sepak bola. Tidak heran, banyak masyarakat termasuk insan PUPR yang mengikuti pertandingan olahraga bulutangkis ini.

### Berada di group B bersama Ditjen Cipta Karya, Ditjen SDA, dan BPIW.

Di babak pertama tim bulutangkis Ditjen Bina Konstruksi mampu menundukan lawan-lawan dari Balitbang, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sehingga mampu lolos berada di babak perempat final.



Menghadapi babak perempat final, tim DJBK melakukan berbagai persiapan dengan latihan yang lebih intensif dari sebelumnya. Di hari pertandingan, tim DJBK bersiap melawan para penantang dari Ditjen Cipta Karya.

Sebelum bertanding, tim juga sempat mengawasi para pemain lain yang sedang bertanding untuk memperebutkan tiket final antara Ditjen SDA dan BPIW. Harus diakui tim bulutangkis Ditjen SDA lebih cerdas dalam menempatkan *shuttlecock* ditempat kosong sehingga mudah dalam mengumpulkan poin hingga menang 30-17.

Waktu yang di tunggu-tunggu pun tiba, tim bulutangkis DJBK bersiap dan melakukan pemanasan sesaat setelah pertandingan pertama di menangkan oleh Ditjen SDA dengan skor 3-0. Saat memasuki lapangan pasangan pertama adalah Nanan Abidin dari Direktorat Bina Investasi Infrastruktur dan Septian dari Sesditjen Bina Konstruksi.

Riuh suara para pendukung kedua tim terasa saat pertandingan baru dimulai. Para penonton bersorak memberikan semangat para pemain untuk bisa meraih poin demi poin. Di babak pertama tim DJBK berhasil meraih poin lebih dulu dan disambut gembira para supporter.

Perlahan tapi pasti tim DJBK bisa memberikan tekanan kepada tim Ditjen Cipta Karya hingga unggul pada poin 12 – 4 untuk babak pertama. Namun, keadaan terbalik setelah *break* babak pertama, tim bulutangkis Ditjen Cipta Karya tidak mau mengalah meski sudah diberikan *smash-smash* keras dari tim DJBK.

Mereka akhirnya berhasil meraih poin satu persatu hingga akhirnya sama di posisi 12 – 12. Sontak keadaan tersebut membuat para supporter kedua tim semakin semangat memberikan dukungannya dengan meneriakkan jargon-jargon khas masing-masing. Hingga akhirnya di babak pertama tim Ditjen Cipta Karya berhasil menang 15 – 12.

Di babak kedua, tim DJBK mendapat arahan tambahan dari pelatih untuk lebih berani menyerang dan jangan terbawa arus permainan lawan. Dengan masukan dari pelatih tim kembali masuk lapangan dan bersiap di pertandingan babak kedua. Di babak penentuan ini tim DJBK harus bisa memenangkan *games* agar bisa memaksa tim lawan bermain 3 babak dan merebut kemenangan pertama.

Perlahan tapi pasti tim DJBK menghasilkan beberapa poin dari kesalahan-kesalahan pukulan dari tim lawan. Sayangnya, keberuntungan belum berada di tim DJBK

permainan yang diberikan oleh tim Ditjen Cipta Karya lebih baik dari tim DJBK dan mengakhiri babak dengan skor 30–21. Untuk sementara tim DJBK harus merasa puas dengan skor 1–0 dari Ditjen Cipta Karya.

Permainan kedua, tim DJBK dan Ditjen Cipta karya memberikan suguhan berbeda dengan memasangkan ganda campuran yakni Denik dari Direktorat Bina Investasi Infrastruktur dan Rizky dari Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Sebelum memasuki lapangan keduanya mendapatkan instruksi untuk langsung menyerang lawan, dan jangan lengah.

Instruksi pelatih cukup membuahkan meski permainan baru di mulai Tim DJBK berhasil merebut poin dan mengungguli hingga 12-3. Hasil ini pun berhasil diselesaikan dengan baik hingga akhir babak pertama dimana tim DJBK keluar sebagai pemenang dengan 15 – 10.

Di babak kedua, tim DJBK tidak mau mengalah dan terus memberikan tekanan dan *smash-smash* keras yang sulit dikembalikan oleh tim DJBK hingga tertinggal dengan skor 19–22. Meski terlihat dengan memberikan pukulan-pukulan keras ke bidang permainan lawan, namun dewi fortuna belum memihak Tim Ditjen Bina Konstruksi. hingga akhirnya berhasil membalikan keadaan dengan skor 30 – 23.

Dan di babak terakhir Tim DJBK berhasil menguasai permainan kembali dengan menyerang di tempat kosong bidang permainan lawan. Sadar berada di babak penting, para supporter memberikan semangat yang luar biasa dengan teriakan-teriakan yang luar biasa karena pertandingan sangat seru untuk ditonton. Hingga hasil harus diakui tim DJBK kalah dari permainan tim Cipta Karya dengan skor 45–36.

Meski disayangkan namun, tim DJBK patut diberikan apresiasi karena telah memberikan permainan terbaiknya. Dan keluar sebagai juara ketiga setelah berhasil menang melawan tim bulutangkis BPIW.

Hasil ini cukup menggembirakan karena di tahun sebelumnya Ditjen Bina Konstruksi belum pernah keluar sebagai juara di pertandingan bulutangkis dalam rangka Hari Bakti Kementerian PUPR yang ke 72.

Semoga semangat dalam setiap perlombaan ini dapat diimplementasikan dengan baik para insan PUPR untuk membangun Ibu pertiwi dengan infrastruktur berkualitas untuk masyarakat Indonesia.

Semangat Bekerja. Semangat PUPR !!!



## SELAYANG PANDANG TENTANG SISTEM MANAJEMEN K3 di Aspal Buton Sulawesi Tenggara

📍 Syarkowi

**B**eberapa waktu lalu Kami (tim Redaksi) mendapat kesempatan untuk menghadiri *Focus Group Discussion (FGD)* tentang pembahasan Draft Revisi PU No 35/PRT/M/2006 tentang peningkatan pemanfaatan Aspal Buton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan yang diadakan di Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara.

Bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, dan beberapa *stakeholder* seperti Loka Peneliti dan Pengembangan Asbuton, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan dan Asosiasi Pengembangan Aspal Buton, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan dan Asosiasi Pengembangan Aspal Buton Indonesia (ASPABI). Dalam kunjungan ini kami memanfaatkan untuk meninjau tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja salah satu penunjang rantai pasok konstruksi yakni Aspal Buton atau yang dikenal Asbuton

Belakangan terjadi hal yang paling ditakuti industri konstruksi yakni kecelakaan

kerja konstruksi, yang menyebabkan korban jiwa. Dari tahun ke tahun sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki resiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat kerugian yang akan timbul bukan hanya korban jiwa, namun tertundanya proses produksi, hingga kerusakan lingkungan yang akhirnya berdampak bagi masyarakat luas.

Penggalan berita di atas merupakan sebagian kecil dari beberapa berita tentang kecelakaan kerja konstruksi yang beberapa bulan menghantui industri konstruksi Indonesia. Sebab sebagaimana diketahui bersama, Indonesia menjadi salah satu negara yang tengah gencar membangun infrastruktur dengan berbagai proyek infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, dan bendungan di seluruh Indonesia. Sehingga dengan masih adanya kecelakaan kerja di proyek konstruksi tentu menimbulkan sedikit kekhawatiran akan berjalannya program Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Padahal, sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Menteri PU No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, disebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

Pada dasarnya setiap kegiatan dan lokasi pekerjaan selalu ada bahaya yang mengancam, baik pada manusia, makhluk hidup lainnya, harta benda atau asset asset di sekitarnya. Kerugian atau risiko yang di akibatkannya tentunya bervariasi tingkat fatalitasnya, dari yang sangat kecil sampai kepada yang sangat besar dan kemungkinan terjadinya kehilangan nyawa/ kematian.

Upaya mencegah risiko kerugian terhadap bahaya yang ada tersebut merupakan upaya upaya yang sistematis melalui serangkaian kegiatan yang dimulai mengenali hazard atau bahaya, siapa dan

apa dampaknya, berapa besar kemungkinan risiko terjadi, berapa besar kemungkinan kerugian harta benda, cedera, kecacatan atau nyawa yang akan ditimbulkan.

Ilmu pengetahuan ataupun praktek-praktek yang baik dan sesuai di dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang dimaksud di atas. Jadi, pentingnya K3 terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan yang logis dan sistematis serta teknologi yang sesuai yang dapat menekan kemungkinan risiko yang mungkin terjadi pada setiap tahapan dan lokasi kegiatan.

Diatur dalam Pasal 59 Undang – Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 , dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar tersebut meliputi standar mutu bahan, mutu peralatan, standar keselamatan



dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi dan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga masuk dalam standar yang harus dipenuhi.

Dari tinjauan selang pandang

kami, sekilas terlihat perusahaan telah memperlihatkan aspek kebijakan dan komitmennya dengan penyediaan sumber daya K3, baik sumber daya manusia dan fasilitas K3 baik untuk pekerja maupun pengunjung/tamu. Berupa media atau tatacara penyampaian informasi K3 di perusahaan produksi Asbuton tersebut melalui poster K3, rambu rambu k3, papan pengumuman dan kesiapan Alat Pelindung Diri (APD).



Insiden jatuhnya beton baja (grider) jembatan Tol Pasuruan- Probolinggo (Paspro) di Kilometer 4,5 di Desa Dawesari, Kecamatan Grati, Pasuruan, disebut murni kecelakaan kerja. (Media Indonesia, 30 Okt 2017)

Seorang pengendara sepeda motor tertimpa beton proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang jatuh di Jalan Panglima Polem Raya yang bersimpangan dengan Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Corporate Secretary PT MRT, Tubagus Hikmatullah mengatakan, kondisi pengendara itu hanya luka ringan. (Sindonews.com, 4 November 2017)

Saat ini, dengan pembangunan infrastruktur yang massif, berimbas terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya material yang semakin meningkat, dimana penerapan K3 sangat mempengaruhi produktivitas aspal Buton. Untuk itu diperlukan pula pemantauan dan Evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material, dalam hal ini Aspal Buton secara berkelanjutan.

Guna mencegah terjadi kembali kecelakaan kerja konstruksi sosialisasi terhadap budaya K3 dalam bidang konstruksi terus dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi dengan melakukan bimbingan teknis SMK3 di berbagai provinsi yang dihadiri baik oleh unsur pemerintah daerah, badan usaha dan para ahli. Pembinaan dan pengawasan penerapan K3 juga dilakukan bersama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melibatkan para asosiasi bidang K3 termasuk Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4).

Pembaca sekalian, baru-baru ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimuljono memberikan arahan agar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus senantiasa tertib mutu yaitu: memperhatikan metode dan prosedur kerja serta meminimalisir kegagalan konstruksi. Hal ini berarti seluruh pelaksana pembangunan infrastruktur, baik pengguna jasa dalam hal ini pemerintah maupun pelaku jasa konstruksi harus bahu membahu mengawasi pekerjaan konstruksi agar sesuai kaidah K3.

Sebab bukan hanya pemilik pekerjaan yang akan merugi jika terjadi kecelakaan kerja atau kegagalan bangunan, tapi juga masyarakat. Untuk itu, partisipasi masyarakat untuk mengawasi juga sangatlah penting. Karena melalui pengawasan langsung dari masyarakat, dapat diketahui langsung dari lapangan apakah K3 dilaksanakan atau tidak dalam sebuah proyek konstruksi. Perlu ada konsistensi dari penyedia jasa dalam melaksanakan K3 pada proyek infrastruktur. Tanpa konsistensi yang kuat, peraturan terkait K3 tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Tak hanya itu, kecelakaan kerja menimbulkan *multiplier effect* bagi semua aspek dalam proyek konstruksi. Dampak kecelakaan kerja terdapat pada level mikro hingga makro, mulai dari meningkatnya biaya hingga daya saing yang rendah. Dan lebih dari itu, pembangunan infrastruktur akan terhambat, yang berujung pada kerugian negara. •

# KALEIDOSKOP | DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat turut mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi. Selama tahun 2017 beberapa capaian Direktorat Jenderal Bina Konstruksi antara lain :

1

Penguatan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Periode 2016-2020



2

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Mengukuhkan Pengurus LPJK Tingkat Nasional



3

Ditjen Bina Konstruksi bertemu Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)



4

Lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 Menjadi Jawaban Kebutuhan Dinamika Sektor Konstruksi Di Indonesia



5

Sosialisasi Undang-Undang Jasa Konstruksi Ke Beberapa Kota di Indonesia



6

Kementerian PUPR Menerima Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2017 melalui Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi (SIBIMA) Konstruksi



7

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi Melakukan Sertifikasi 813 Tenaker Konstruksi





8

Komisi V DPR RI mengapresiasi Program Serah Terima Pinjam Pakai Mobile Training Unit (MTU)



9

Ditjen Bina Konstruksi melakukan Serah Terima Simpan Pinjem Mobile Training Unit (MTU) Kepada Beberapa Pemerintah Daerah



10

Sertifikasi 3255 Tenaga Kerja Konstruksi Kerjasama Kementerian PUPR dengan Stakeholder



11

Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur



12

Pekan Jasa Konstruksi 2017 di Palembang yang dimeriahkan dengan Pameran Konstruksi, Workshop, dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi



13

Soft Launching Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur



14

Sertifikasi Massal 10.000 Tenaga Kerja Konstruksi yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo



15

Konstruksi Indonesia 2017 "Era Baru Industri Konstruksi Indonesia" yang dimeriahkan dengan Pameran, Workshop Rantai Pasok Sumber Daya Jasa Konstruksi dan Pertemuan Bilateral

# VISI MENJADI MIMPI, MIMPI MENJADI VISI

*"Vision Without Work is a Daydream, Work Without Vision is a Nightmare"*  
Japanese Proverb

**V**isi tanpa bekerja hanyalah sebuah lamunan, kerja tanpa visi adalah mimpi buruk. Kalimat ini bukanlah sebuah perumpamaan semata, bisa dibayangkan apabila Anda sebagai seorang mandor pada sebuah proyek konstruksi. Anda sedang memeriksa pekerjaan para tukang atau anak buah Anda, sebelumnya sebagai mandor Anda sudah memberikan instruksi untuk mengerjakan pekerjaan Konstruksi.

Lalu Anda mengecek bagaimana pekerjaan para tukang yang sedang Anda kerjakan?, tukang pertama sebut saja Ade "De, *lagi* mengerjakan apa?" Ade menjawab "Saya sedang mengaduk semen pak." Selesai menjawab Ade pun melanjutkan pekerjaannya dengan mengaduk semen.

Tukang ke dua yang bernama Rido dengan pertanyaan yang sama, "Do, *lagi* apa?" Rido menjawab "*Lagi* mengaduk semen pak untuk plester tembok dan menyusun bata." Terdapat sedikit perbedaan dari jawaban yang diberikan oleh tukang kedua dengan memberikan keterangan tentang yang ia kerjakan.

Terakhir, bernama Ujang mendapat pertanyaan yang sama "Jang, *keur naon?* (lagi apa)" karena Ujang orang keturunan daerah Sunda, dia menjawab dengan dialek sunda "*keur ngaduk* semen pak. Untuk memplester bata sama untuk plester temboknya. Pak nanti bagian ini akan diplester lalu diberikan ornamen/lukisan agar terlihat menarik, sementara di bagian lain akan diberikan *walpaper* agar lebih bervariasi." Ujang juga menambahkan apabila "Nantinya akan terlihat lebih Indah, mewah dan modern". Dengan wajah yakin dan pasti Ujang menunjukan seluruh imajinasinya kepada sang mandor.

Dari ketiga pekerja tersebut, sudah dapat terlihat bahwa Ujang memiliki visi yang jelas daripada kedua temannya. Meski tidak berarti mengerjakan pekerjaan yang tidak baik dan benar, namun Ujang memiliki pandangan jelas ke depan tentang pekerjaan yang sedang ia kerjakan.

Sebagai mandor, apakah Anda hanya akan memberikan ilmu yang standar kepada tukang atau anak buah? Apakah Anda seorang mandor yang takut tersaingi sehingga membiar potensi seperti itu di biarkan saja bagai tidak terlihat. Para pahlawan infrastruktur seperti Ujang merupakan salah satu gambaran tentang seorang tukang bangunan yang memiliki visi, jika kita biarkan tanpa memberikan tambahan pengetahuan/ilmu dalam bidang konstruksi orang-orang seperti Ujang akan hanya bisa bekerja sebagai tukang.

Tukang seperti ini layak diberikan sertifikat untuk membuktikan kompetensi pekerjaannya. Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi tengah berupaya membuktikan kompetensi para tenaga kerja konstruksi seperti Ujang dalam sebuah sertifikasi. Di Indonesia orang-orang seperti Ujang tidaklah sedikit, bisa juga dibayangkan jika orang-orang seperti ini diberikan sertifikat dan naik kelas menjadi seorang mandor atau pengawas lapangan.

Misalkan, saat ini Ujang hanya seorang tukang dari mandor yang sibuk membangun rumah dari satu kompleks ke kompleks perumahan. Apabila ia diberikan sertifikasi, pelatihan dan ilmu pengetahuan, bukan tidak mungkin dalam waktu setahun atau dua tahun kemudian ia akan mengerjakan bangunan bertingkat.

Bahkan tidaklah berlebihan dengan visi yang ia miliki ditahun-tahun berikutnya

Ujang akan bisa membangun sebuah jembatan dan jalan yang diperuntukkan masyarakat desanya hingga masyarakat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang sebagai sumber perekonomian di Indonesia ini akan terlaksana dengan baik dan kokoh. Indonesia membutuhkan Ujang-Ujang lainnya, yang memberikan gambar bagaimana bangunan gedung, rumah, jalan, hingga jembatan akan berdiri untuk masyarakat Indonesia di esok hari.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, terhubung satu sama lain dengan mudah melalui sarana infrastruktur darat, laut, maupun udara yang mumpuni. Nilai ekonomi masyarakat Indonesia sama rata, keindahan Indonesia di sektor pariwisata bisa lebih banyak menarik minat wisatawan lokal maupun internasional.

Bukan tidak mungkin, pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa besar dan dampaknya akan terasa yaitu untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Jika semua benar-benar terwujud mimpi menjadi negara besar dan maju seperti Amerika, Inggris, hingga Jepang dan Korea Selatan dapat terpenuhi. Jadi, mari kita dorong tenaga kerja konstruksi untuk mampu mewujudkan mimpinya menjadi visi nyata...

*(Inspirasi dari LionMag Edisi Nov 2017)*



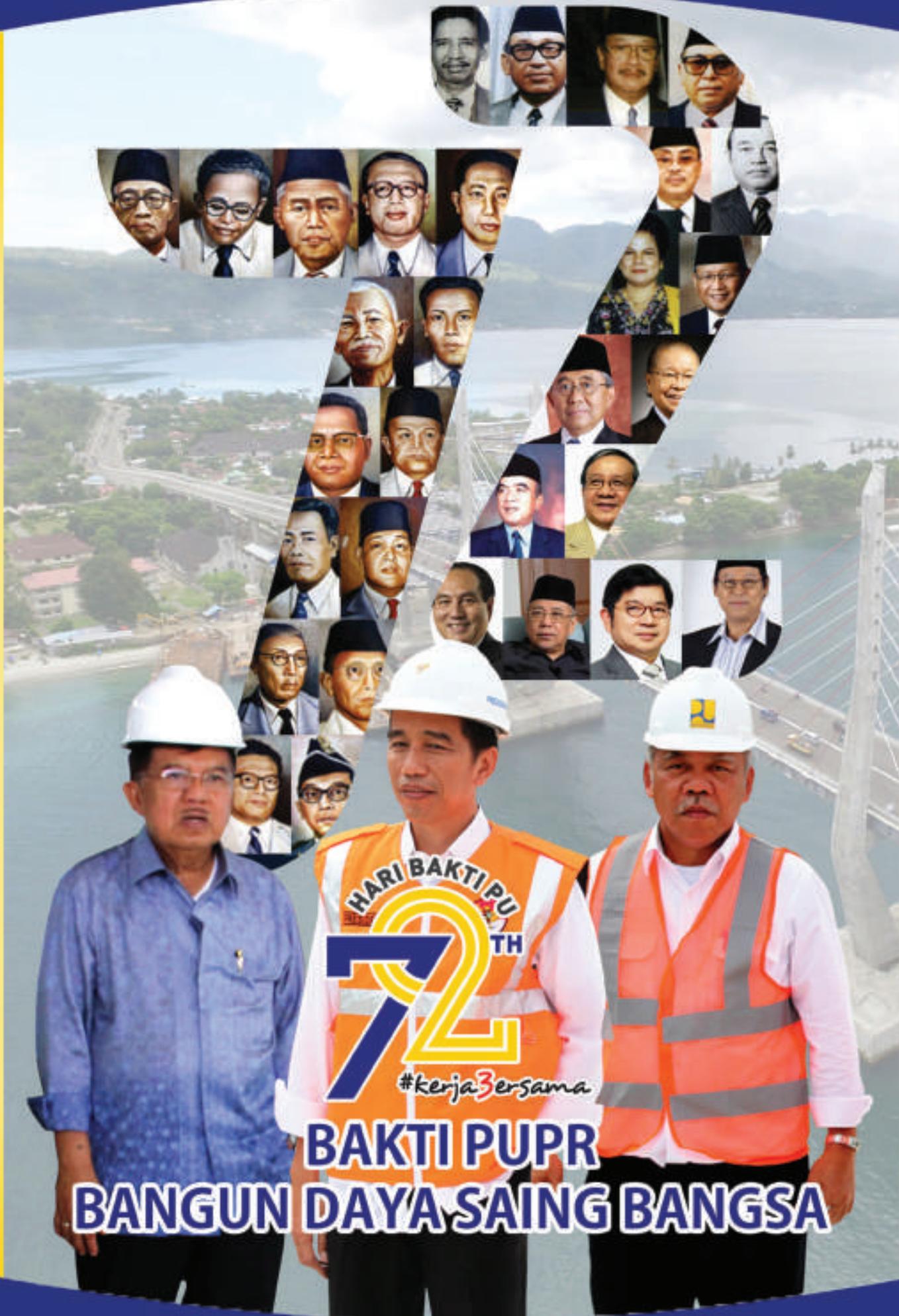
# GALERIFOTO



rekaman**LENSA**

Hari Bhakti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





**BAKTI PUPR  
BANGUN DAYA SAING BANGSA**